

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar Dasar Kebijakan Publik (Edisi Revisi)*. Bandung: Alfabeta.
- Indianahono Dwiyanto, 2009, *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy*, Yogyakarta Analisis, Gava Media
- Mardalis, 2010. *Metode Penelitian, Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara
- Moeleong, Lexy J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2011. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo
- Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Negara*. Bandung: Alfabeta
- Singarimbun, Masri, dan Sofian Effendi. 2008. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono, AG. 2006 *Analisis Kebijakan Publik, Konsep, Teori dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara
- Wibawa, Samodra dkk, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Grafindo Persada

Winarno, Budi. 2007. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo

Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Caps Yogyakarta

### **TESIS**

Atik Rahmawati. 2011. "Pelaksanaan Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Studi Pada Komunitas Suku Laut di Pulau Bertam – Kota Batam. Tesis. Ilmu Kesejahteraan Sosial, FISIP Universitas Indonesia, Depok.

Juni Arman. 2011. "Negara dan Masyarakat Adat (Studi Pemanfaatan Kawasan Hutan oleh Masyarakat Adat di Desa Matotonan Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai. Tesis. Ilmu Politik, Universitas Andalas, Padang.

### **SKRIPSI**

Alfiandri, 2018. "Islam Matotonan (Kajian Antropologi Agama Pada Penganut Islam Mentawai), Skripsi, Antropologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang

Ivan Rusli Lia Andrian. 2017. "Program Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (Studi Kasus Pemberdayaan Komunitas Adat terpencil Kementerian Sosial di Dusun Banaran Desa Ponggok, Kecamatan Pacian, Kabupaten Pacitan, Provinsi Jawa Timur, Skripsi, Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Brawijaya, Malang.

Nadia Angraini, 2020. "Implementasi Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat di Kabupaten Lima Puluh Kota. Skripsi, Ilmu Administrasi Publik, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

## **DOKUMEN**

BPS Kabupaten Kepulauan Mentawai (Kabupaten Kepulauan Mentawai dalam Angka 2020)

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2013. *Masyarakat Adat di Indonesia: Menuju Perlindungan Sosial Yang Inklusif*. Jakarta: Direktorat Perlindungan dan Kesejahteraan Masyarakat/ Bappenas

Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor: 460- 446- 2014 Tentang pembentukan Kelompok Kerja Pemberdayaan Komunitas Adat Tepencil Provinsi Sumatera Barat

Keputusan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor: 188.45- 33 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Kabupaten Kepulauan Mentawai

Laporan Hasil Penjajakan Awal dan Studi Kelayakan (PASK) Komunitas Adat Terpencil (PKAT) Lokasi Dusun Matektek, Desa Matotonan, Kec. Siberut Selatan, dan Dusun Malancan Timur Kec. Siberut Utara Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018

Laporan Pelaksanaan APBN Tahun 2018 Direktorat Pemberdayaan Sosial.

Peraturan Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Nomor 05 Tahun 2019 tentang  
Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Sosial Lingkup Direktorat Jenderal  
Pemberdayaan Sosial

Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal  
Tahun 2015-2019

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 186 Tahun 2014 tentang  
Pemberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang  
Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 tentang  
peremberdayaan Sosial Terhadap Komunitas Adat Terpencil

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Melalui  
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Tahun 2018 Direktorat  
Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil

Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat 2016-2021

RPJM Desa Matotonan Tahun 2018-2023

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. 2018. Program Bantuan  
Pemerintahan Untuk Individu, Keluarga dan Kelompok Tidak Mampu  
Menuju Bantuan Sosial Terintegrasi. Jakarta: TNP2K

Tugas Pokok dan Uraian Tugas Seksi Pemberdayaan Sosial, Perorangan,  
Keluarga, Kelembagaan Masyarakat dan Komunitas Adat Terpencil Dinas  
Sosial Provinsi Sumatera Barat



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang  
Kesejahteraan Sosial

### **INTERNET**

[https://republika.co.id/berita/pvliii368/solok-selatan-dan-pasaman-barat-lepas-  
status-tertinggal](https://republika.co.id/berita/pvliii368/solok-selatan-dan-pasaman-barat-lepas-status-tertinggal)

[https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2016/10/11/30/persentase-penduduk-  
miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat-tahun-2000-2018.html#](https://sumbar.bps.go.id/dynamictable/2016/10/11/30/persentase-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota-di-sumatera-barat-tahun-2000-2018.html#)

[https://kemsos.go.id/ditjen-pemberdayaan-sosial/4-Parameter-Keberhasilan  
Pemberdayaan-Komunitas-Adat-Terpencil-Ditjen-Pemberdayaan-Sosial-  
Kementerian-Sosial-Republik-Indonesia](https://kemsos.go.id/ditjen-pemberdayaan-sosial/4-Parameter-Keberhasilan-Pemberdayaan-Komunitas-Adat-Terpencil-Ditjen-Pemberdayaan-Sosial-Kementerian-Sosial-Republik-Indonesia)

